

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pertanyakan Kinerja BUMD KBB

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung Barat

Sumber / Hal : Radar Bandung/Hal.6

Edisi : Jum'at, 19 Januari 2018

POLEMIK

Pertanyakan Kinerja BUMD KBB

PADALARANG - Kinerja direksi BUMD Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dipertanyakan seiring dengan adanya kasus hukum terkait utang pada pihak ketiga senilai Rp8 miliar. Padahal sejak didirikan tahun 2010 setidaknya penyertaan modal Rp35 miliar telah dikantongi PT. Perdana Multiguna Sarana (PMgS) yang bergerak di penyediaan air bersih.

Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) Jawa Barat Eka Suwarna menyatakan, jika BUMD merugi itu hal biasa. Tapi tidak biasa dalam kasus BUMD PT PMgS karena kemudian menyisakan masalah hukum yang berbuntut rencana penyitaan aset BUMD yang notabene adalah aset daerah.

"Suntikan modal Rp35 miliar dari APBD itu saja belum dipertanggungjawabkan, sekarang justru muncul masalah hukum berupa gugatan utang oleh pihak ketiga sebesar Rp8 miliar," ucapnya, kemarin.

Dirinya menilai, dalam kondisi ini harus segera dilaksanakan RUPS luar biasa untuk mengevaluasi kinerja direksi dan menyelamatkan aset milik daerah. DPRD harus segera meminta pertanggungjawaban pemegang saham dan direksi BUMD khususnya atas penggunaan dana Rp35 miliar dan laksanakan audit oleh auditor independen yang terpercaya.

"Pemerintah daerah juga harus menyetop kucuran modal pada BUMD yang sakit ini serta membentuk tim profesional utk melakukan pendampingan," terangnya.

Terpisah Pemkab Bandung Barat meminta direksi BUMD PT PMgS bertanggung jawab terhadap permasalahan aset yang dihadapi. (bie)